

## ABSTRAK

### **Oktavianus Akto: Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Tahun 2022**

Pemerintah desa sudah saatnya menunjukkan pertanggungjawaban anggaran, melalui program kinerja yang dilakukan seperti pembangunan fisik maupun non fisik. Besarnya anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk setiap desa yang ada di seluruh Nusantara ini, memprioritaskan desa mengunakan anggaran tersebut secara maksimal dan efisien. Pada penerapannya tak sedikit oknum dari aparatur dan perangkat desa yang terlibat penyimpangan dana atau korupsi. Untuk menghindari maka diperlukanlah akuntabilitas penganggaran dana desa sebagai tembok untuk meminimalisir hal tersebut. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk dalam mengelola Desa dan segala urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa, termasuk DD (Dana Desa). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tehnik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu Transparansi, Pertanggungjawaban, Pengendalian, Pertanggungjawaban, dan Ketanggapan menurut Koppel. Dimana hasil dari penelitian ini mengenai aparatur Desa Tanjung Bunga yang masih belum mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dalam proses pengelolaan dan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat, masih terdapatnya tindakan korupsi terhadap anggaran yang ada, serta kurangnya tanggungjawab dari aparatur Desa Tanjung Bunga untuk masyarakat. Ciri dari akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi mengenai anggaran yang ada, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan kinerja yang dilakukan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menekankan kedisiplinan dan tanggungjawab dengan anggaran yang digunakan sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Penggunaan, Anggaran

# THE ACCOUNTABILITY OF THE USE OF VILLAGE FUNDS IN TANJUNG BUNGA VILLAGE OF KEMBAYAN DISTRICT OF SANGGAU REGENCY

By:

**OKTAVIANUS AKTO<sup>1\*</sup>**

ID: E1011171016

Dr. H. Rusdiono, M.Si<sup>2\*</sup>, Drs. Abdul Rahim, M.Si<sup>2\*</sup>

Email: [oktavianusakto23@student.untan.ac.id](mailto:oktavianusakto23@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura.

## Abstract

It is time for the village government to demonstrate fiscal responsibility by implementing performance programs such as physical and non-physical development. The central government budgeted amount for each village throughout the archipelago prioritizes villages to use the fund optimally and efficiently. In its practice, many members of the village apparatus are implicated in the misuse of funds or corruption. To avoid this, accountability for budgeting village finances is required as a barrier. Law Number 6 of 2014 on Village has explained that the village has the authority to manage the village and all administrative affairs in the village, including DD (Village Fund). This study used the qualitative method with a descriptive approach. This study used the qualitative method with a descriptive approach. The techniques of data collection were interviews, observation, and documentation with purposive sampling as the subject sampling technique. This study also used Koppel's indicators namely Transparency, Accountability, Control, Accountability, and Responsiveness. The results of this study showed that Tanjung Bunga Village apparatus was still not able to show maximum performance in the process of managing and using the budget for the welfare of the community, there were still acts of corruption toward the existing budget, and there was a lack of responsibility from the Tanjung Bunga Village apparatus for the community. The characteristics of accountability were the openness of information regarding the existing budget, as well as community involvement in the development process and performance which was done in accordance with applicable laws and regulations. The inhibiting factor was the lack of Human Resources in emphasizing discipline and responsibility with the budget used causing errors in decision-making and action.

**Keywords: Accountability, Use, and Budget.**

